

Panglima TNI Serahkan Bantuan Tabung Oksigen dan Alkes ke Masyarakat Papua

JAKARTA (IM) – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyerahkan 50 tabung berisi oksigen, 50 konseptor, 1000 APD, dan 150 ribu masker buat masyarakat Papua. Bantuan dari Panglima TNI telah mendarat di base ops Lanud Silas Papare, Kamis (22/7).

Komandan Lanud Silas Papare Marsma TNI Budi Achmadi menyampaikan bahwa bantuan ini adalah wujud perhatian Mabes TNI, dalam hal ini Panglima TNI masyarakat Papua agar pandemi Covid-19 di Tanah Cendrawasih dapat diatasi.

“Seluruh bantuan ini nantinya akan didistribusikan ke Rumah Sakit yang ada di Jayapura, terutama untuk mendukung kekurangan kebutuhan khususnya di RSUD Dok 2 Jayapura dan RSUD Yowari Sentani” kata Budi.

Budi menjelaskan bahwa

ketersediaan instalasi medis di Papua sangat terbatas, sementara berdasarkan laporan dari Satgas Covid 19 Provinsi Papua, sejak 17 Maret hingga 20 Juli kemarin, tercatat lebih dari 30 ribu pasien terkonfirmasi positif Covid-19, dan saat ini lebih dari 5000 pasien masih dirawat.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut memaksa rumah sakit bekerja ekstra keras, bahkan ada pasien yang terpaksa harus ditolak karena alasan kapasitas rumah sakit.

Panglima TNI berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk dapat menjaga dan melayani masyarakat Papua agar terhindar dari virus Covid-19.

Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Komandan Lanud Silas Papare mewakili Mabes TNI kepada Pendeta Lipiyus Biniluk sebagai tokoh agama mewakili masyarakat Papua. ● mei

Calon Wagub Papua, Golkar Usulkan Nama Komjen Paulus Waterpauw

JAYAPURA (IM) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar Papua buka suara terkait nama-nama kader partai yang diusulkan sebagai pengganti Wakil Gubernur Papua, Almarhum Klemen Tinal. Golkar mengusulkan 6 nama calon.

Nama keenam calon telah diserahkan langsung pihak DPD Golkar Papua kepada tim koalisi Papua Bangkit jilid II di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Rabu (21/7) kemarin.

Dari enam nama yang diusulkan DPD Golkar Papua tersebut lima diantaranya merupakan kader partai berlabang pohon beringin dan satu orang non kader partai.

Menurut Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Papua, Max Richard Krey, dari enam nama yang diusulkan tersebut satu orang diantaranya adalah Komisaris Jenderal Polisi, Paulus Waterpauw yang saat ini menjabat

sebagai Kepala Badan Intelkam Polri. Menurut Krey, lima orang lainnya adalah kader partai Golkar.

Krey mengatakan, walaupun telah diusulkan 6 calon Wagub Papua oleh DPD Golkar Papua, namun hingga kini pihaknya belum mendapatkan rekomendasi dari DPP Golkar Pusat.

“Untuk rekomendasi DPP belum, ini baru rekomendasi DPD I Golkar Papua. Nanti 6 nama itu dikirim ke Jakarta untuk mendapatkan rekomendasi DPP ada 2 nama itu yang kita tidak tahu, itu DPP yang putus,” ujar Krey.

Menurut Krey, Partai Golkar terbuka bukan hanya kader tapi juga menerima aspirasi dari masyarakat itu yang akan akomodir.

“Karena partai Golkar ini betul – betul terbuka kepada seluruh masyarakat dan kita tidak hanya mencalonkan kader kami dalam pencalonan ini,” tandasnya. ● mei

IDN/ANTARA



SIDANG PERDANA EDY RAHMAT

Sekretaris Dinas PU Sulawesi Selatan Edy Rahmat berjalan keluar sesuai menjalani sidang perdana secara virtual terkait kasus dugaan suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021 di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/7). Sidang tersebut beragendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.

DPR Berharap Larangan TKA Masuk ke Indonesia Ditegakkan

JAKARTA (IM) - Pemerintah secara resmi telah melarang masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Tanah Air, termasuk TKA untuk proyek strategis nasional selama PPKM Darurat berlangsung. Pelarangan itu diumumkan pada Rabu 21 Juli 2021.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi keputusan pemerintah yang melarang TKA masuk Indonesia selama diterapkan PPKM Darurat – sekarang disebut PPKM Level 4. Menurutnya, memang sudah saatnya pemerintah mengambil langkah tegas.

“Memang sudah saatnya ada kebijakan seperti ini, mengingat beberapa kasus di Indonesia diakibatkan oleh longgarnya pengawasan terhadap WNA yang masuk. Jadi saya apresiasi kebijakan Pak Menkumham yang mengedepankan keselamatan dan keamanan kita semua,” kata

Sahroni keada wartawan, Kamis (22/7).

Untuk itu, politikus Partai Nasdem ini berharap, kebijakan ini bisa ditegakkan dengan adil dan tidak pandang bulu. Baik itu perusahaan kecil atau besar, semua harus sama perlakuannya.

“Tentunya saya berharap agar aturan ini berlaku dengan tanpa pandang bulu, bagi TKA dari perusahaan kecil maupun besar seperti tambang,” ujarnya.

Legislator Dapil DKI Jakarta ini juga meminta agar aturannya dibuat jelas dan disosialisasikan dengan baik, hingga tidak menyebabkan kebingungan di kalangan industri. “Selain itu, peraturannya juga harus jelas dan disampaikan dengan baik kepada para pemain industri, sehingga tidak menciptakan kebingungan dan kerancuan di masyarakat,” tandas Sahroni. ● mei

2 Polhukam



IDN/ANTARA

TNI AL SIAPKAN SEBAGAI DEPO ISI ULANG OXYGEN

Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Yudo Margono (kdeua kanan) menyerahkan bantuan tabung oksigen secara simbolis kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan) di KRI dr. Soeharso-990 di Koarmada II, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (22/7). TNI AL melalui Koarmada II membantu Pemprov Jatim dalam pelayanan isi ulang oksigen bagi Rumah sakit dan masyarakat yang membutuhkan.

Indonesia Beli 6 Pesawat Latih Tempur Canggih T-50i dari Korsel

Indonesia membeli enam jet latih T-50i buatan Korea Aerospace Industries Co (KAI). Harga pesawat tersebut disinyalir mencapai 240 juta dolar Amerika Serikat.

JAKARTA (IM) – Kementerian Pertahanan (Kemhan) tengah melakukan proses pengadaan enam unit pesawat Latih Tempur Lead-In Fighter Training (LIPT) jenis T-50i Golden Eagle dari Korea Selatan. “Ini merupakan kontrak pengadaan yang kedua, dan kelanjutan kerja sama dengan perusahaan Korea Aerospace Industries (KAI),” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemhan, Marsma TNI Penny Radjendra dalam siaran pers-nya, di Jakarta, Kamis (22/7). Menurut Penny, Kemhan RI telah melakukan kerja sama dengan KAI sudah cukup lama, yaitu sejak 2014. Pada awal 2014, Kemhan

transparansi, dan akuntabilitas sehingga objektivitas dalam setiap tahapan proses kontrak dapat dipertanggungjawabkan.

“Pengadaan enam unit pesawat T-150i dari KAI Korea Selatan ini juga dilaksanakan dengan tetap memperhatikan optimalisasi pemanfaatan komponen industri dalam negeri untuk mendukung penguatan industri strategis dalam negeri,” ujarnya.

Pengadaan Pesawat T-50i, tambah Penny, merupakan upaya Kemhan RI untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat strategis bagi TNI AU. “Hal tersebut dalam rangka menyiapkan penerbang-penerbang tempur yang andal dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dari Sabang sampai Merauke,” tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia dikabarkan telah menerima kesepakatan pembelian enam jet latih T-50i buatan Korea Aerospace Industries Co (KAI). Nilai kesepakatan

tersebut disinyalir mencapai 240 juta dolar Amerika Serikat. Berdasarkan kesepakatan itu, KAI akan memasok enam jet latih canggih T-50 ke Angkatan Udara Indonesia dari 16 Desember 2021 hingga 30 Oktober 2024.

Kehebatan T-50 Golden Eagle

Mengutip tni-au.mil.id, T-50 Golden Eagle adalah pesawat latih (trainer) supersonik buatan Amerika-Korea. Dikembangkan oleh KAI dengan bantuan Lockheed Martin. Program ini juga melahirkan pesawat A-50, atau T-50LIPT, sebagai varian serang-ringan. Walaupun militer AS tidak ada rencana untuk membeli pesawat ini, penamaan militer AS secara resmi diminta untuk pesawat ini guna menghindari konflik penamaan di kemudian hari.

Program T/A-50 dimaksudkan sebagai pengganti dari berbagai pesawat latih dan serang ringan. Ini termasuk T-38 dan F-5B untuk pelatihan dan Cessna A-37B Close Air Support yang dioperasikan

AU Republik Korea. Program ini pada awalnya dimaksudkan untuk mengembangkan pesawat latih secara mandiri yang mampu mencapai kecepatan supersonik. Ini untuk melatih dan mempersiapkan pilot bagi pesawat KF-16 (F-16 versi Korea).

Pesawat T-50 membuat Korea Selatan menjadi negara ke-12 yang mampu memproduksi sebuah pesawat tempur jet yang utuh. Beberapa produk korea lainnya adalah KT-1 produk Samsung Aerospace (sekarang bagian dari KAI), dan produk lisensi KF-16. Sebagian besar sistem utama dan teknologinya disediakan oleh Lockheed Martin. Secara umum bisa disebut T/A-50 mempunyai konfigurasi yang mirip dengan KF-16. Pengembangan pesawat ini 13% dibiayai oleh Lockheed Martin, 17% oleh Korea Aerospace Industries, dan 70% oleh pemerintah Korea Selatan. KAI dan Lockheed Martin saat ini melakukan program kerja sama untuk memasarkan T-50 untuk pasar internasional. ● han

Dipolisikan KPK, Greenpeace Bingung untuk Menanggapinya

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan organisasi lingkungan global, Greenpeace Indonesia, ke Polres Metro Jakarta Selatan. Pelaporan itu berkaitan dengan aksi Greenpeace yang melakukan tembakan sinar laser bertuliskan “Jujur itu Dipecah” ke Gedung KPK pada Senin, 28 Juni 2021, lalu.

Greenpeace Indonesia menanggapi santai pelaporan tersebut. Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Asep Komarudin menyatakan pihak masih enggan mengeluarkan pernyataan sikap resmi terkait pelaporan tersebut. “Sementara ini kami masih belum mengeluarkan rilis atau pernyataan sikap terkait laporan tersebut karena memang sampai dengan saat ini kami belum menerima surat apapun dari Polres,” kata Asep kepada wartawan, Kamis (22/7).

Asep mengaku baru mengetahui adanya laporan KPK ke polisi terkait aksi ‘penembakan’ laser tersebut dari media. Ia belum mendapat pembentahan resmi dari polisi. Namun, Asep merasa bingung terkait laporan KPK tersebut. Sebab sebelumnya, KPK melalui Plt Juru Bicara, Ali Fikri, sempat mengapresiasi aksi Greenpeace.

“Nah terkait adanya laporan

tersebut, kami ya bingung juga menanggapinya, karena sebelumnya pasca aksi kan KPK ada mengeluarkan pernyataan kalau tidak permasalahan hal tersebut dan mengapresiasi karena menurutnya sebagai dukungan publik terhadap pemberantasan korupsi,” kata Asep.

Sekadar informasi, Gedung Merah Putih KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, dihiasi oleh berbagai warna-warni tulisan kritis, pada Senin, 28 Juni 2021, malam hari. Warna-warni tulisan itu bersumber dari sebuah laser yang kemudian ‘ditembak’ ke arah Gedung KPK.

KPK melaporkan aksi kasus penembakan laser berisikan pesan-pesan menohok di Gedung lembaga antikorupsi itu pada Senin 28 Juni 2021, malam. Menanggapi itu, KPK melalui Biro Umumnya melakukan pelaporan terhadap aksi Greenpeace Indonesia itu.

“Terkait peristiwa penyinaran laser ke arah Gedung KPK pada tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 19.05 WIB oleh pihak eksternal, benar, KPK melalui Biro Umum telah melakukan koordinasi dan pelaporan kepada Polres Jakarta Selatan,” ujar Plt Juru bicara KPK Ali Fikri. ● han

Tiga Pejabat Pemkab Bandung Barat Diperiksa Penyidik KPK Terkait Korupsi Bansos Covid-19

JAKARTA (IM) – Tiga pejabat Pemkab Bandung Barat, Kamis (22/7) diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) Covid-19.

Ketiganya adalah Riki Riadi (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan), Ir Anni Roslianti (Kabag Pengadaan Barang Jasa), dan Chandra Kusuma Wijaya (Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan PUPR).

Ketiganya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid 19 pada Dinsos Pemkab Bandung Barat tahun 2020. Pemeriksaan rencananya dilakukan di Kantor Pemkab Bandung Barat.

“Bertempat di Kantor Pemkab Bandung Barat, tim penyidik menggendakan pemanggilan saksi-saksi untuk tersangka AUM (Aa Umbara Sutisna) dkk tersebut,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (22/7).

Tak hanya para pejabat tersebut, penyidik juga memanggil sejumlah saksi lainnya yakni, Karyawan Honorar pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung

Barat, Ajeng Dahlia; Direktur Utama PT Jagat Dirgantara, Asep Cahyadinata; serta Direktur CV Satria Jaktamilung, Asep Saepudin.

Terkait kasus ini, KPK telah menetapkan Bupati non-aktif Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna (AUM) dan anaknya, Andri Wibawa (AW) selaku pihak swasta sebagai tersangka kasus korupsi terkait pengadaan paket bahan pangan (sembako) untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

Tak hanya anak dan ayah tersebut, KPK juga menetapkan pemilik PT Jagat Dirgantara (PT JDG) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL) M Totos Gunawan (MTG) sebagai tersangka dalam kasus ini. Para tersangka tersebut diduga total menerima keuntungan Rp5,7 miliar dari korupsi tersebut.

Dalam perkara ini, Aa Umbara Sutisna diduga menerima uang sebesar Rp1 miliar terkait pengadaan paket bahan pangan (sembako) untuk penanggulangan Covid-19 di Bandung Barat. Sedangkan Andri Wibawa, diduga menerima keuntungan sebesar Rp2,7 miliar. Sementara M Totos Gunawan diduga menerima Rp2 miliar. ● han



PT BINAKARYA

PT BINAKARYA JAYA ABADI TBK
("Perseroan")

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (Rapat) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 16 Agustus 2021
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Royal Palm Hotel
Jalan Outer Ring Road, Mutiara Taman Palem Blok C1, Cengkareng, Jakarta Barat

Dengan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 5 huruf a dan pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan; serta Pasal 69 ayat 1 dan pasal 78 Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Laporan Tahunan Perseroan, termasuk laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; Penjelasan:

Berdasarkan pasal 11 ayat 5 huruf b Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 70 & 71 Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, penggunaan laba bersih memerlukan keputusan RUPS.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta penetapan honorarium dan persyaratan lainnya; Penjelasan:

Direksi mengusulkan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, sesuai dengan pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

4. Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan datang. Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 15 ayat 16 dan Pasal 18 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain untuk Direksi ditentukan oleh RUPS dan dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, sedangkan untuk penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Perseroan mengusulkan untuk penetapan gaji/honorarium Dewan Komisaris didelegasikan pada Pemegang Saham Pengendali Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Persetujuan penyelesaian Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 Maksud dan Tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI Tahun 2017, serta Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka secara Elektronik.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan mengeluarkan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi Pemegang Saham pada Rekening KSEI dalam penitipan kolektif (Anggota Bursa/Bank Kustodian) diwajibkan memberikan data investornya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
3. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya, untuk itu Perseroan menyediakan 2 (dua) jenis kuasa:
 - Kuasa Elektronik, melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY KSEI) yang disediakan KSEI, yang merupakan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam penyelenggaraan Rapat yang dapat dilakukan sejak tanggal Panggilan sampai dengan 1 (hari) kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
 - Kuasa Konvensional, formulirya tersedia di situs web Perseroan www.bpg.id dengan ketentuan Surat Kuasa asli dan fotocopy tanda pengenal pemberi kuasa, harus sudah diterima Perseroan melalui PT Raya Saham Registrasi selaku Biro Administrasi Efek (BAE) yang beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav 47-48, Jakarta tel: 0212525666 paling lambat 3 (tiga) hari kerja pada pukul 16.00 WIB sebelum tanggal Rapat.
4. Bahan Rapat dapat diunduh pada web Perseroan www.bpg.id.
5. Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan Pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19, Perseroan sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah BAE PT Raya Saham Registrasi melalui fasilitas eASY KSEI.
6. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang tetap akan hadir dalam Rapat untuk menaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 dan menunjukkan kepada petugas pendaftaran hasil tes pemeriksaan kesehatan PCR/ Rapid Test Antigen Negatif 2x24 jam sebelum Rapat.
7. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lain yang masih berlaku untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotokopy Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir serta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 23 Juli 2021
PT Binakarya Jaya Abadi TBK
Direksi